BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan saat ini. Dalam tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, istilah desa tidak asing lagi bagi. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan. Setidaknya, terdapat 74,754 desa di Indonesia yang didiami lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia. Keberadaan desa dicirikan dengan homogennya sistem pencaharian penduduknya adalah petani, nelayan, pekebun, peternak, dan lain sebagainya (Wida, 2016).

UU No. 06 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara, dana akan langsung sampai kepada kepala desa.

Menurut Sujarweni (2015:17) Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014

Keuangan desa adalam semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segaa sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa di antaranya adalah :

1. Masyarakat desa.
2. Perangkat desa.
3. Pemerintahan daerah.
4. Pemerintah pusat.

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dab kebutuhannya mempunyai peran yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan dengan kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Desa memiliki peran yang pentng, khususnya dalam pelaksaan tugas dibidang pelayanan publik. Disentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa (Ibnu, 2016).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaruan guna mendukung pembangunan daerah yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah

Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kote untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. Alokasi Dana Desa bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10% diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional untuk masing-masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa (BPMPD, 2014). Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012). Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Kementerian Desa menginformasikan bahwa 80,0 persen dana desa (Rp16,09 triliun) telah masuk ke RKUD. Namun, pencairan ke RKD baru mencapai 53,05 persen (Rp8,53 triliun) saja. Kalaupun dana desa telah cair ke RKD, masalah lain yang berpotensi untuk mencuat adalah kesalahan dalam menyusun anggaran dan penyelewengannya. Persoalannya bukan semata lemahnya SDM dalam mengelola peruntukan dana desa, melainkan juga ketidaksiapan mental aparat desa. Menghadapi hal tersebut, perlu diberikannya sejumlah program pembangunan kapasitas seperti pelatihan

aparatur dan juga pengawasan yang mempersempit ruang bagi tindak penyalahgunaan dengan memperkuat pendampingan dan pengawalan pengelolaan dana desa secara sistemik (Kementrian Keuangan, 2016).

Dikutip dari koran Radar Lampung menyatakan bahwa saat ini dana transfer dari pusat diprovinsi lampung belum maksimal, Dana Desa (DD) salah satunya. Data yang ada pada Direktorat Jendral (Dirjen) Perbendaharaan Lampung, sarapan DD untuk tahun anggaran (TA) 2017 baru mencapai 68,21% persentase itu sama dengan realisasi sebesar Rp. 1,3 triliun dari total DD sebesar Rp. 1,9 triliun. Kakanwil Sitjen Alfiker Siringoringo mengakui harus ada peningkatan realisasi program yang ada dilaporan. Dana transfer dari pusat yang diialirkan ke provinsi ini sebesar Rp. 12,6 triliun. Sementara realisasinya hingga Oktober 2017 baru mencapai Rp. 8 triliun. "jika presentase baru 63,98 %, sementara target realisasi 91,6% dari Rp. 12,6 triliun paling tidak menyentuh angka 90%. Berdasarkan situs dari Kementrian Keuangan, besaran dana transfer yang paling banyak akan didapat Dilampung Tengah yakni sebesar Rp. 261.266.761, diikuti Tanggamus dan Lampung Timur".

Menurut UU No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, pada Pasal 9 ayat (3) disebutkan bahwa jumlah Dana Desa diperkirakan sebesar Rp. 20.766.200.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus juta rupiah). Adapun jumlah dari rincian alokasi Dana Desa untuk 13 kabupaten di Provinsi Lampung menurut Lampiran XXII Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2015 adalah sebesar Rp. 684.727.653.000 (enam ratus delapan puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dari ke 13 kabupaten tersebut di atas, Kabupaten Lampung Tengah dengan jumlah alokasi dana desa sebesar Rp. 84.410.047.000 (delapan puluh empat miliar empat ratus sepuluh juta empat puluh tujuh ribu

rupiah) merupakan “Kabupaten/Kota Penerima Alokasi Dana Desa Terbesar di Provinsi Lampung”

Tabel 1.1 Rincian pembagian Dana Desa Provinsi Lampung

No.	Nama Kabupaten/Kota	Alokasi (Dalam Rupiah)	Rank
1.	Kab. Lampung Barat	36.292.903.000	9
2.	Kab lampung Selatan	73.656.914.000	4
3.	Kab. Lampung Tengah	84.410.047.000	1
4.	Kab. Lampung Timur	76.156.736.000	3
5.	Kab. Lampung Utara	65.563.245.000	5
6.	Kab. Mesuji	29.397.590.000	12
7.	Kab. Pesawaran	41.542.850.000	7
8.	Kab. Pesisir Barat	32.175.347.000	11
9.	Kab. Pringsewu	34.831.337.000	10
10.	Kab. Tanggamus	81.744.367.000	2
11.	Kab. Tulang Bawang	41.463.133.000	8
12.	Kab. Tulang Bawang Barat	26.394.427.000	13
13.	Kab. Way Kanan	61.098.757.000	6
	Jumlah	**684.727.653.000**	

Sumber : Kementrian Keuangan

Fenomena saat ini terjadi dilampung tengah yaitu adanya penyelewengan dana dalam program pemerintah pusat melalui ADD untuk percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tertinggal di Kecamatan Punggur, Lampung tengah diduga tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan belanja Kampung (APBK). Hasil penkerjaan ADD Tahun 2017 tahap pertama dan dua yang digarap oknum-oknum kepala kampung diwilayah tersebut terbukti jauh dari bestek. Ada tujuh kampung dikecamatan Punggur pekerjaannya diduga asal jadi, yaitu kampung Mojopahit, Kampung Srisawahan, Kampung Nunggal Rejo, Kampung Astomulyo, Kampung Totokaton, dan Kampung Ngesti Rahayu (Rubikmedia, 2018). Dengan

adanya penyimpangan pelanggaran tersebut penulis tertarik melakukan penelitian di Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah. Masyarakat Kecamatan Bandar Mataram perlu mengetahui aliran dana desa apakah sudah diterapkan sesuai dengan APBK.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ibnu Wardana (2016) dengan judul Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ibnu Wardhana (2016) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada ruang lingkup yang mana penelitian ini terdapat pada desa-desa dikecamatan Bandar Mataram serta penelitian ini terdapat pada periode 2018. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA-DESA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH".**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan pada tujuan penelitian maka penulis membatasi ruang lingkup skripsi ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup yaitu Kecamatan Bandar Mataran Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan adalah sampel pada penelitian ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram?
2. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Kecamatan Bandar Mataram.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Bandar Mataram. Berikut ini beberapa manfaat yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Bagi Pemerintah

   Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban fisik sehingga meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Bandar Mataram Lampung Tengah, juga dijadikan sebagai bahan evaluasi pengelolaan ADD di Desa-Desa yang ada dikecamatan Bandar Mataram.

2. Bagi Peneliti

   Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah wawasan penulis.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran skripsi ini dan agar mudah dalam memahaminya, maka disusun penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat mengenai : latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variabel dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang sumber data yang digunakan metode pengumpulan data, populasi dan sampel yang di ambil, variable

penelitian dan definisi operasional vaariabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interprestasi hasil serta penjelasan terkait argumentasi yang sesuai dengan hasil penelitian.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN